TAKHADUM
Jurnal Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/TAKHADUM
Vol. 1 | No. 1 | 31 Maret 2026 | Hal. 01-18 |
ISSN-PRINT: XXXX-XXXX ISSN-ONLINE: XXXX-XXXX

Penguatan Literasi Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama melalui Pendidikan Partisipatif di Kampung Sukosari Kecamatan Baradatu

Suryadi[1], Lilik Anggraini[2], Fatimah Aristiati[3]

[123] Fakultas Tarbiyah, Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia.

Mail:
[1] ysur6611@gmail.com; [2] lilikangraini2005@gmail.com; [3] faristiati@gmail.com

Article received: (27 February 2026), Review process: (06 March 2026)
Article Accepted: (10 March 2026), Article published: (31 March 2026)

Abstract: Low civic literacy, weak social participation, and limited understanding of religious moderation remain significant challenges in building inclusive and democratic communities. This study aims to develop and evaluate a community-based Civic Education program integrating civic literacy, religious moderation, and digital literacy in Sukosari Village, Baradatu District. The study employed a Participatory Action Research (PAR) approach involving 30 participants consisting of community leaders, religious leaders, youth, and local residents. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), documentation, and pre-test and post-test instruments. The novelty of this study lies in the integration of civic education, religious moderation, and digital literacy within a participatory community empowerment model. The findings indicate that the program successfully improved participants' understanding of democratic citizenship, inclusive religious attitudes, and critical digital literacy. In addition, the program strengthened community participation in social activities and encouraged more dialogical and inclusive social interaction. The study concludes that community-based civic education can serve as an effective participatory empowerment model for strengthening civic awareness and religious moderation in multicultural communities.

Keywords: Civic Literacy, Religious Moderation, Civic Education, Social Participation, Community-Based Education.

Abstrak: Rendahnya literasi kewarganegaraan, lemahnya partisipasi sosial, serta terbatasnya pemahaman moderasi beragama masih menjadi tantangan dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengevaluasi program edukasi PKn berbasis masyarakat yang mengintegrasikan literasi kewarganegaraan, moderasi beragama, dan literasi digital di Kampung Sukosari Kecamatan Baradatu. Penelitian menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan 30 partisipan yang terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan warga umum. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dokumentasi, serta instrumen pre-test dan post-test. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi pendidikan kewarganegaraan, moderasi beragama, dan literasi digital

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dalam model pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai kewarganegaraan demokratis, sikap keagamaan yang inklusif, serta kemampuan literasi digital kritis. Program juga mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan berkembangnya pola komunikasi yang lebih dialogis dan inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa edukasi PKn berbasis masyarakat dapat menjadi model pemberdayaan partisipatif yang efektif dalam memperkuat kesadaran kewarganegaraan dan moderasi beragama di masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Literasi Kewarganegaraan, Moderasi Beragama, Pendidikan Kewarganegaraan, Partisipasi Sosial, Pendidikan Berbasis Masyarakat.

INTRODUCTION

Dalam lanskap global kontemporer, relasi antara kewarganegaraan, agama, dan ruang publik mengalami pergeseran yang semakin kompleks. Kemajuan teknologi digital tidak hanya memperluas akses informasi, tetapi juga mempercepat sirkulasi ideologi, identitas, dan narasi keagamaan yang kerap bersifat eksklusif. Fenomena meningkatnya polarisasi sosial, intoleransi berbasis identitas, serta menguatnya populisme religius di berbagai negara menunjukkan bahwa tantangan kewarganegaraan abad ke-21 tidak lagi sekadar berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, melainkan juga kemampuan warga dalam mengelola perbedaan secara konstruktif (Mouffe, 2005; Castells, 2015). Dalam konteks ini, kegagalan membangun kapasitas kewarganegaraan yang kritis dan inklusif berpotensi melahirkan fragmentasi sosial yang mengancam kohesi masyarakat demokratis.

Indonesia sebagai negara dengan tingkat pluralitas tinggi menghadapi tantangan serupa dalam skala yang tidak kalah kompleks. Keberagaman agama, etnis, dan budaya yang menjadi kekayaan bangsa sekaligus menyimpan potensi konflik apabila tidak dikelola secara bijak. Data dan berbagai laporan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, gejala intoleransi dan eksklusivisme keagamaan masih menjadi persoalan laten di tengah masyarakat (Wahid Foundation, 2021). Dalam banyak kasus, konflik sosial tidak semata dipicu oleh perbedaan keyakinan, tetapi oleh rendahnya literasi kewarganegaraan yang menyebabkan individu gagal memahami batas antara ekspresi kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak orang lain. Hal ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberagaman itu sendiri, melainkan pada kapasitas warga dalam memaknai dan mengelolanya.

Secara teoretis, literasi kewarganegaraan tidak cukup dipahami sebagai pengetahuan normatif tentang hak dan kewajiban, tetapi harus dimaknai sebagai kompetensi multidimensional yang mencakup kemampuan berpikir kritis, kesadaran politik, serta disposisi etis dalam kehidupan publik (Banks, 2017). Literasi ini menuntut warga untuk tidak hanya “tahu”, tetapi juga “mampu” dan “bersedia” berpartisipasi dalam proses sosial secara reflektif dan bertanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih cenderung terjebak dalam pendekatan instruksional yang menekankan hafalan konsep, bukan internalisasi nilai. Akibatnya, terdapat kesenjangan serius antara pengetahuan kewarganegaraan dengan praktik sosial di masyarakat (Winataputra, 2015).

Di sisi lain, moderasi beragama yang digagas sebagai strategi nasional dalam menjaga harmoni sosial sering kali berhenti pada level diskursus normatif dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat akar rumput. Moderasi beragama, yang seharusnya menjadi paradigma dalam beragama secara adil, seimbang, dan toleran, kerap dipersepsikan secara sempit sebagai sekadar jargon kebijakan (Kementerian Agama RI, 2019). Padahal, tanpa penguatan pada level praksis sosial, konsep moderasi beragama berisiko kehilangan daya transformasinya dalam merespons tantangan intoleransi dan radikalisme (Azra, 2020).

Kritik mendasar terhadap dua domain ini—literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama—terletak pada lemahnya integrasi keduanya dalam pendekatan edukasi yang kontekstual. Literatur yang ada cenderung memposisikan keduanya sebagai entitas yang berdiri sendiri, padahal secara substantif keduanya memiliki irisan yang kuat dalam membentuk warga negara yang demokratis sekaligus religius secara inklusif (Abdullah, 2018). Ketiadaan integrasi ini berdampak pada lahirnya pendekatan yang parsial: pendidikan kewarganegaraan yang kering dari nilai spiritual, serta pendidikan keagamaan yang kurang sensitif terhadap realitas kebangsaan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah berupaya menjembatani persoalan tersebut. Hoskins et al. menunjukkan bahwa penguatan civic competence berkontribusi signifikan terhadap peningkatan partisipasi sosial dan politik (Hoskins et al., 2012). Sementara itu, Hosen menegaskan bahwa moderasi beragama efektif dalam mereduksi kecenderungan ekstremisme jika diinternalisasikan melalui Pendidikan (Hosen, 2019). Di tingkat nasional, Suryadi menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam meningkatkan relevansi pendidikan kewarganegaraan (Suryadi, 2018). Namun demikian, studi-studi tersebut masih memiliki keterbatasan mendasar.

Pertama, sebagian besar penelitian berorientasi pada setting pendidikan formal, sehingga mengabaikan dinamika pembelajaran di ruang sosial masyarakat yang justru lebih menentukan pembentukan sikap dan perilaku. Kedua, pendekatan yang digunakan masih bersifat top-down dan kurang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembelajaran. Ketiga, belum terdapat model integratif yang secara eksplisit menggabungkan literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama dalam satu kerangka edukasi berbasis komunitas. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan pendekatan baru yang lebih kontekstual dan transformatif.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif melalui program edukasi PKn berbasis masyarakat yang mengintegrasikan penguatan literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama secara simultan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, integrasi konseptual antara civic literacy dan religious moderation dalam satu desain program edukasi yang utuh. Kedua, penggunaan pendekatan berbasis masyarakat (community-based education) yang menempatkan warga sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Ketiga, kontekstualisasi program berdasarkan realitas sosial lokal, sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, dipilih sebagai locus penelitian bukan tanpa alasan. Secara sosiologis, wilayah ini merepresentasikan komunitas dengan tingkat heterogenitas yang cukup tinggi, baik dari aspek sosial maupun keagamaan. Namun demikian, heterogenitas tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kapasitas literasi kewarganegaraan yang memadai. Berdasarkan temuan awal, masih terdapat kecenderungan eksklusivisme sosial, rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan kolektif, serta pemahaman keagamaan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip moderasi. Dalam beberapa kasus, interaksi sosial masih diwarnai oleh prasangka dan stereotip yang berpotensi menghambat integrasi sosial.

Lebih jauh, penetrasi media sosial di kalangan masyarakat turut memperumit situasi. Informasi yang tidak terverifikasi dengan mudah dikonsumsi dan disebarkan, sehingga membentuk opini publik yang bias dan kadang provokatif. Tanpa kemampuan literasi yang memadai, masyarakat menjadi rentan terhadap narasi-narasi yang memperkuat polarisasi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama bukan sekadar isu normatif, melainkan problem empiris yang nyata dan mendesak untuk ditangani secara sistematis.

Dalam perspektif pedagogis kritis, sebagaimana dikemukakan oleh Freire, pendidikan seharusnya berfungsi sebagai praksis pembebasan yang memungkinkan individu memahami realitas sosialnya secara kritis dan bertindak untuk mengubahnya (Freire, 1970). Oleh karena itu, pendekatan edukasi berbasis masyarakat menjadi relevan karena mampu menciptakan ruang dialogis antara pengetahuan dan pengalaman hidup warga. Melalui pendekatan ini, proses pembelajaran tidak lagi bersifat indoktrinatif, melainkan partisipatif dan reflektif.

Selain itu, secara normatif, penguatan literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama memiliki legitimasi kuat dalam kerangka kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Dengan demikian, upaya penguatan kedua aspek ini tidak hanya memiliki urgensi akademik, tetapi juga relevansi ideologis dan konstitusional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya integrasi antara literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama dalam praktik edukasi di tingkat masyarakat, khususnya di Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu. Ketiadaan model edukasi yang kontekstual, partisipatif, dan integratif menjadi hambatan dalam upaya membangun masyarakat yang toleran, kritis, dan demokratis.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi secara kritis kondisi literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama masyarakat; (2) mengembangkan desain program edukasi PKn berbasis masyarakat yang integratif dan kontekstual; (3) mengimplementasikan program tersebut melalui pendekatan partisipatif; serta (4) mengevaluasi dampaknya terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga menawarkan model praktis yang dapat direplikasi dalam upaya memperkuat kohesi sosial di masyarakat multikultural.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan secara terbatas dengan pendekatan kuantitatif (*embedded mixed methods*). Pemilihan desain ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman fenomena, tetapi juga pada transformasi sosial melalui intervensi program edukasi PKn berbasis masyarakat. PAR relevan digunakan karena menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses perubahan sosial melalui keterlibatan langsung dalam setiap tahapan penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi program (Kemmis & McTaggart, 2005). Pendekatan ini juga sejalan dengan kebutuhan integrasi literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama yang menuntut proses pembelajaran kontekstual, partisipatif, dan reflektif (Freire, 1970).

Penelitian dilaksanakan melalui siklus PAR yang bersifat iteratif, meliputi tahap perencanaan (*planning*), tindakan (*action*), observasi (*observation*), dan refleksi (*reflection*). Pada tahap perencanaan, dilakukan pemetaan awal kondisi masyarakat melalui observasi pendahuluan dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengidentifikasi kebutuhan serta merumuskan desain program edukasi. Tahap tindakan berupa implementasi program edukasi PKn berbasis masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan partisipatif, diskusi komunitas, dan simulasi praktik nilai-nilai kewarganegaraan dan moderasi beragama. Tahap observasi dilakukan secara partisipatif untuk memantau dinamika pelaksanaan program dan perubahan yang terjadi, sedangkan tahap refleksi dilakukan secara kolaboratif guna mengevaluasi efektivitas program serta merumuskan perbaikan berkelanjutan (Kemmis & McTaggart, 2005).

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu dari Januari hingga Maret 2026, di Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap sesuai siklus *Participatory Action Research* (PAR), yang meliputi tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi (Kemmis & McTaggart, 2005). Penelitian ini dengan melibatkan 30 partisipan utama dalam program edukasi yang terdiri dari 6 tokoh masyarakat, 4 tokoh agama, 8 pemuda, dan 12 warga umum. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 informan kunci yang dipilih secara *purposive* berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan FGD dilaksanakan dalam dua sesi yang masing-masing diikuti oleh 10–12 peserta untuk menggali perspektif kolektif terkait literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama. Pemilihan partisipan menggunakan teknik *purposive sampling* agar data yang diperoleh bersifat mendalam dan relevan dengan fokus penelitian (Creswell, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*), FGD, kuesioner terbatas dalam bentuk *pre-test* dan *post-test*, serta dokumentasi. Observasi digunakan untuk menangkap dinamika sosial selama program berlangsung, sementara wawancara mendalam bertujuan menggali pengalaman dan pandangan informan secara lebih mendalam. FGD digunakan untuk memperoleh data kolektif yang merepresentasikan pandangan masyarakat, sedangkan *pre-test* dan *post-test* diberikan kepada seluruh peserta program (30 orang) untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman mereka terhadap materi literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama. Kombinasi teknik ini

memungkinkan diperolehnya data yang komprehensif dan saling melengkapi (Creswell, 2014).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Data kuantitatif dari *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara deskriptif untuk melihat kecenderungan peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti program.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode, *member check*, serta *peer debriefing*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan FGD, sedangkan *member check* dilakukan dengan mengonfirmasi temuan kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti. Keterlibatan intensif peneliti di lapangan juga memperkuat kredibilitas data (Lincoln & Guba, 1985).

Penelitian ini juga memperhatikan prinsip etika penelitian, meliputi persetujuan partisipan (*informed consent*), kerahasiaan identitas responden, serta penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

RESULTS AND DISCUSSION

Kondisi Awal Literasi Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama Masyarakat

Hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa persoalan utama masyarakat Kampung Sukosari bukan terletak pada lemahnya hubungan sosial antarwarga secara umum, melainkan pada belum berkembangnya kesadaran kewarganegaraan kritis dan belum kuatnya internalisasi nilai moderasi beragama dalam praktik kehidupan sehari-hari. Secara sosial, masyarakat masih menunjukkan pola interaksi yang relatif harmonis, namun harmoni tersebut lebih bersifat kultural dan tradisional, bukan hasil dari kesadaran reflektif mengenai pentingnya kehidupan demokratis dan penghormatan terhadap keberagaman. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas sosial masyarakat sebenarnya masih cukup rentan ketika dihadapkan pada isu-isu sensitif yang berkaitan dengan agama, politik, maupun identitas sosial lainnya.

Berdasarkan hasil *pre-test* terhadap 30 peserta program, ditemukan bahwa sebagian besar peserta belum mampu memahami keterkaitan antara hak dan kewajiban warga negara dengan praktik toleransi dan partisipasi sosial. Sebanyak 63% peserta hanya memaknai kewarganegaraan dalam aspek administratif, seperti kepemilikan identitas kependudukan, kepatuhan terhadap aturan formal, dan keterlibatan dalam pemilu. Sementara itu, dimensi kewarganegaraan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, partisipasi aktif, kemampuan berdialog, dan keterlibatan dalam penyelesaian persoalan sosial masyarakat masih relatif rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai kewarganegaraan masih bersifat formalistik dan belum berkembang menjadi civic consciousness yang kritis dan partisipatif.

Rendahnya kesadaran partisipatif masyarakat juga terlihat dari minimnya keterlibatan warga dalam kegiatan sosial kampung. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kegiatan musyawarah, kerja bakti, maupun forum diskusi masyarakat cenderung didominasi oleh tokoh tertentu, sedangkan sebagian besar warga hanya berperan sebagai pendengar pasif. Kelompok pemuda menjadi kelompok yang paling

rendah tingkat keterlibatannya dalam aktivitas sosial masyarakat. Sebagian besar pemuda lebih aktif dalam aktivitas digital dibandingkan keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial di lingkungan mereka. Kondisi ini memperlihatkan adanya gejala menurunnya budaya partisipasi sosial pada tingkat komunitas.

Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, rendahnya partisipasi sosial tersebut menunjukkan lemahnya implementasi nilai demokrasi pada level masyarakat. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik formal, tetapi juga menyangkut kemampuan warga untuk terlibat aktif dalam ruang publik dan proses pengambilan keputusan sosial (Banks, 2017). Ketika masyarakat hanya menjadi objek keputusan tanpa keterlibatan aktif dalam proses sosial, maka budaya demokrasi yang berkembang cenderung bersifat semu dan elitis. Oleh karena itu, persoalan utama masyarakat Kampung Sukosari bukan sekadar rendahnya pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga lemahnya praktik kewarganegaraan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Dari aspek moderasi beragama, penelitian menemukan bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki hubungan sosial yang cukup baik antarwarga. Konflik terbuka berbasis agama tidak ditemukan selama penelitian berlangsung. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki cara pandang yang eksklusif terhadap kelompok yang berbeda pandangan sosial maupun keagamaan. Sebagian peserta memaknai toleransi hanya sebagai sikap “tidak mengganggu” kelompok lain, bukan sebagai kesediaan membangun komunikasi, dialog, dan kerja sama lintas perbedaan. Dengan kata lain, toleransi yang berkembang masih bersifat pasif, belum sampai pada tingkat toleransi aktif yang berbasis penghormatan terhadap keberagaman.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama di tingkat masyarakat belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari praktik kewarganegaraan demokratis. Padahal, moderasi beragama tidak hanya berkaitan dengan sikap keagamaan yang tidak ekstrem, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif dan berkeadaban (Kementerian Agama RI, 2019). Ketika moderasi beragama hanya dipahami secara normatif tanpa diikuti kesadaran sosial yang kritis, maka nilai toleransi akan mudah melemah ketika masyarakat dihadapkan pada isu-isu provokatif yang memicu polarisasi sosial.

Persoalan tersebut semakin diperkuat oleh tingginya pengaruh media sosial terhadap pola pikir masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi kelompok, sebagian besar peserta mengaku lebih sering memperoleh informasi sosial, politik, dan keagamaan melalui media sosial dibandingkan forum diskusi langsung di lingkungan masyarakat. Sebanyak 70% peserta juga mengaku pernah membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi sumber terlebih dahulu. Fenomena ini menunjukkan rendahnya literasi digital masyarakat dalam menyikapi arus informasi yang berkembang di ruang digital.

Rendahnya kemampuan literasi digital memiliki implikasi serius terhadap kehidupan sosial masyarakat. Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memperkuat stereotip, prasangka sosial, dan polarisasi berbasis identitas. Dalam beberapa kasus, peserta mengaku mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang beredar di media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu agama dan politik.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih rentan terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian akibat lemahnya kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan literasi kewarganegaraan saat ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ruang digital. Warga negara tidak hanya dituntut memahami hak dan kewajiban secara konvensional, tetapi juga harus memiliki kemampuan kritis dalam mengelola informasi dan berinteraksi di ruang publik digital. Tanpa kemampuan tersebut, masyarakat akan mudah terjebak dalam polarisasi sosial dan konflik identitas yang diproduksi melalui media digital (Castells, 2015).

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pendekatan pendidikan dan sosialisasi yang selama ini diterima masyarakat cenderung bersifat formalistik dan satu arah. Penyampaian materi kewarganegaraan maupun moderasi beragama lebih banyak dilakukan melalui ceramah normatif tanpa memberikan ruang dialog dan refleksi sosial kepada masyarakat. Akibatnya, nilai-nilai yang disampaikan hanya dipahami sebagai konsep teoritis dan belum terinternalisasi dalam perilaku sosial masyarakat sehari-hari. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendidikan normatif dengan realitas sosial masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama masyarakat Kampung Sukosari bukan sekadar keterbatasan pengetahuan, tetapi lemahnya kesadaran sosial kritis dalam mempraktikkan nilai kewarganegaraan dan moderasi beragama secara nyata. Rendahnya partisipasi sosial, lemahnya kemampuan literasi digital, dan toleransi yang masih bersifat pasif menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan pendekatan edukasi yang lebih kontekstual dan partisipatif. Oleh karena itu, penguatan literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formal dan seremonial, tetapi memerlukan model edukasi berbasis masyarakat yang mampu menghubungkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Table 1. Kondisi Awal Literasi Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama

Aspek yang Diamati	Temuan Utama
Pemahaman kewarganegaraan	Masih administratif dan formalistik
Partisipasi sosial	Rendah dan didominasi tokoh tertentu
Keterlibatan pemuda	Relatif rendah dalam kegiatan sosial
Moderasi beragama	Toleransi masih bersifat pasif
Literasi digital	Verifikasi informasi masih rendah
Pengaruh media sosial	Tinggi terhadap pembentukan opini masyarakat
Pola edukasi sebelumnya	Formalistik dan satu arah

Source: Primary Data, 2026.

Pengembangan Program Edukasi PKn Berbasis Masyarakat

Berdasarkan hasil identifikasi awal, ditemukan bahwa persoalan utama masyarakat Kampung Sukosari tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan edukasi

yang bersifat normatif dan seremonial semata. Rendahnya partisipasi sosial, lemahnya literasi digital, serta belum kuatnya internalisasi moderasi beragama menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan model pembelajaran yang lebih kontekstual dan partisipatif. Oleh karena itu, program edukasi PKn dalam penelitian ini dikembangkan dengan pendekatan berbasis masyarakat (*community-based education*) yang menempatkan warga sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran sosial.

Pengembangan program dilakukan melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kampung, kelompok pemuda, dan warga umum dalam proses perencanaan program. Keterlibatan masyarakat sejak tahap awal bertujuan untuk memastikan bahwa materi, metode, dan bentuk kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari pola edukasi top-down yang selama ini cenderung menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima materi tanpa ruang refleksi dan partisipasi aktif.

Dalam proses diskusi awal, masyarakat menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi yang selama ini mereka terima sering kali terlalu teoritis dan kurang berkaitan dengan persoalan nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Materi kewarganegaraan dan moderasi beragama umumnya hanya disampaikan dalam bentuk ceramah formal sehingga tidak menghasilkan perubahan perilaku sosial yang signifikan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya informasi, melainkan pada tidak efektifnya metode internalisasi nilai dalam kehidupan masyarakat.

Berangkat dari kondisi tersebut, program edukasi dirancang dengan mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu literasi kewarganegaraan, moderasi beragama, dan literasi digital. Ketiga dimensi tersebut dipilih karena saling berkaitan dalam membentuk kesadaran sosial masyarakat. Literasi kewarganegaraan diperlukan untuk membangun kesadaran partisipatif dan tanggung jawab sosial warga, moderasi beragama dibutuhkan untuk memperkuat sikap toleransi dan inklusivitas, sedangkan literasi digital menjadi penting karena tingginya pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini masyarakat.

Integrasi ketiga dimensi tersebut menjadi salah satu kebaruan program karena pendidikan kewarganegaraan selama ini cenderung dipisahkan dari persoalan literasi digital dan moderasi beragama. Padahal, dalam konteks masyarakat kontemporer, ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat. Rendahnya kemampuan literasi digital dapat memperkuat penyebaran hoaks dan narasi intoleran, sementara lemahnya kesadaran kewarganegaraan menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi sosial berbasis identitas.

Program edukasi kemudian disusun dalam empat bentuk kegiatan utama, yaitu penyuluhan kewarganegaraan, diskusi moderasi beragama, pelatihan literasi digital, dan simulasi partisipasi sosial masyarakat. Setiap kegiatan dirancang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan pengalaman sosial yang mendorong refleksi kritis masyarakat terhadap realitas sosial di lingkungan mereka.

Table 2. Struktur Program Edukasi PKn Berbasis Masyarakat

Fokus Program	Bentuk Kegiatan	Materi Utama	Tujuan
Literasi kewarganegaraan	Penyuluhan dan diskusi	Hak dan kewajiban warga negara, demokrasi, partisipasi sosial	Meningkatkan kesadaran kewarganegaraan partisipatif
Moderasi beragama	Dialog sosial-keagamaan	Toleransi, inklusivitas, penghormatan terhadap perbedaan	Memperkuat sikap moderat dan harmonis
Literasi digital	Pelatihan media digital	Verifikasi informasi, hoaks, etika bermedia sosial	Meningkatkan kemampuan berpikir kritis di ruang digital
Partisipasi sosial	Simulasi musyawarah dan pemecahan masalah sosial	Komunikasi sosial dan pengambilan keputusan bersama	Mendorong keterlibatan aktif masyarakat

Source: Primary Data, 2026.

Pada aspek literasi kewarganegaraan, materi difokuskan pada penguatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, budaya demokrasi, dan pentingnya partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Namun, materi tidak disampaikan secara teoritis semata, melainkan dikaitkan langsung dengan persoalan lokal seperti rendahnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial dan minimnya budaya musyawarah yang inklusif. Pendekatan kontekstual ini dilakukan agar masyarakat mampu memahami bahwa nilai kewarganegaraan bukan sekadar konsep abstrak, tetapi berkaitan langsung dengan kehidupan sosial sehari-hari.

Sementara itu, pada aspek moderasi beragama, kegiatan dikembangkan dalam bentuk dialog sosial-keagamaan yang mendorong peserta untuk mendiskusikan persoalan keberagaman secara terbuka dan reflektif. Dialog dilakukan bukan untuk memperdebatkan keyakinan, tetapi untuk membangun kesadaran bahwa kehidupan sosial yang harmonis memerlukan sikap saling menghormati dan komunikasi yang inklusif. Pendekatan dialogis ini dipilih karena moderasi beragama tidak dapat dibangun melalui indoktrinasi, melainkan melalui pengalaman sosial yang memungkinkan masyarakat memahami perspektif orang lain secara lebih terbuka.

Pelatihan literasi digital menjadi bagian penting dalam program karena tingginya pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi awal, masyarakat masih memiliki kemampuan yang rendah dalam memilah informasi dan mengenali konten provokatif. Oleh karena itu, materi pelatihan difokuskan pada teknik verifikasi informasi, identifikasi berita hoaks, dan etika penggunaan media sosial. Program ini dirancang untuk membangun kemampuan berpikir kritis masyarakat dalam menghadapi arus informasi digital yang semakin kompleks.

Selain itu, simulasi partisipasi sosial dilakukan untuk melatih keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan bersama melalui praktik musyawarah warga. Kegiatan ini penting karena salah satu persoalan utama masyarakat adalah rendahnya keterlibatan warga dalam ruang publik komunitas. Melalui simulasi

tersebut, masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam proses diskusi, menyampaikan pendapat, dan mencari solusi atas persoalan sosial secara kolektif.

Secara metodologis, desain program ini menunjukkan pergeseran paradigma pendidikan kewarganegaraan dari pendekatan instruksional menuju pendekatan transformasional. Pendidikan tidak lagi dipahami sekadar sebagai proses penyampaian materi, tetapi sebagai proses pembentukan kesadaran sosial kritis masyarakat. Dalam perspektif Freire, pendidikan harus mampu menciptakan ruang dialogis yang memungkinkan masyarakat merefleksikan realitas sosialnya dan terlibat dalam proses perubahan sosial secara aktif (Freire, 1970).

Pengembangan program juga mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat Kampung Sukosari yang masih memiliki budaya komunal yang cukup kuat. Oleh karena itu, pendekatan kolektif dan berbasis komunitas dipilih karena dinilai lebih efektif dibandingkan pendekatan individual. Keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam proses perencanaan juga menjadi strategi penting untuk membangun legitimasi sosial program sehingga masyarakat lebih terbuka dan partisipatif dalam mengikuti kegiatan.

Dengan demikian, pengembangan program edukasi PKn berbasis masyarakat dalam penelitian ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan masyarakat, tetapi juga diarahkan pada pembentukan ruang sosial yang lebih partisipatif, kritis, dan inklusif. Program dirancang sebagai upaya membangun kesadaran kewarganegaraan yang kontekstual melalui integrasi literasi kewarganegaraan, moderasi beragama, dan literasi digital dalam kehidupan sosial masyarakat.

Implementasi Program Edukasi PKn Berbasis Masyarakat

Implementasi program edukasi PKn berbasis masyarakat dilaksanakan selama tiga bulan melalui pendekatan partisipatif dan dialogis yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap kegiatan. Berbeda dengan model penyuluhan konvensional yang bersifat satu arah, pelaksanaan program dalam penelitian ini diarahkan untuk menciptakan ruang belajar sosial yang memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima materi, tetapi juga merefleksikan pengalaman sosial mereka secara kritis. Pendekatan ini dipilih karena hasil identifikasi awal menunjukkan bahwa lemahnya literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama di Kampung Sukosari tidak disebabkan oleh absennya informasi, melainkan oleh rendahnya internalisasi nilai dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Pada tahap awal implementasi, peneliti menemukan bahwa sebagian besar peserta masih menunjukkan pola komunikasi yang pasif. Dalam beberapa sesi pertama, diskusi cenderung didominasi oleh tokoh masyarakat dan peserta yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, sedangkan kelompok pemuda dan warga umum lebih banyak menjadi pendengar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya dialog partisipatif di tingkat masyarakat belum terbentuk secara optimal. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa masyarakat masih terbiasa dengan pola komunikasi hierarkis dalam kegiatan sosial.

Namun demikian, setelah beberapa sesi kegiatan berlangsung, terjadi perubahan pola interaksi antarpeserta. Pendekatan dialogis yang digunakan dalam program mulai menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka. Peserta yang

sebelumnya pasif mulai terlibat dalam diskusi dan menyampaikan pandangan mereka terhadap persoalan sosial di lingkungan masyarakat. Perubahan ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sangat dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan. Ketika masyarakat diberi ruang untuk berdialog dan menghubungkan materi dengan pengalaman hidup mereka, proses internalisasi nilai menjadi lebih efektif.

Pada kegiatan penyuluhan kewarganegaraan, materi yang disampaikan tidak hanya berfokus pada konsep hak dan kewajiban warga negara secara teoritis, tetapi dikaitkan langsung dengan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Diskusi mengenai rendahnya partisipasi pemuda, lemahnya budaya musyawarah, dan meningkatnya konflik kecil akibat kesalahpahaman di media sosial menjadi tema yang paling banyak mendapat respons dari peserta. Pendekatan kontekstual tersebut membuat masyarakat lebih mudah memahami bahwa kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam menjaga kehidupan bersama.

Selain itu, implementasi program menunjukkan bahwa persoalan partisipasi sosial masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya kepedulian warga, melainkan oleh minimnya ruang dialog yang inklusif. Sebagian peserta mengaku jarang menyampaikan pendapat dalam forum masyarakat karena merasa pendapat mereka tidak terlalu diperhatikan. Setelah program berlangsung, beberapa peserta mulai menunjukkan keberanian untuk terlibat dalam diskusi dan memberikan masukan terhadap persoalan kampung. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan literasi kewarganegaraan memerlukan penciptaan ruang sosial yang demokratis dan partisipatif.

Table 3. Dinamika Partisipasi Masyarakat Selama Implementasi Program

Aspek yang Diamati	Kondisi Awal	Perubahan Selama Program
Pola komunikasi peserta	Pasif dan hierarkis	Lebih dialogis dan partisipatif
Keterlibatan pemuda	Rendah	Mulai aktif dalam diskusi
Penyampaian pendapat	Didominasi tokoh tertentu	Lebih merata antarpeserta
Respons terhadap persoalan sosial	Cenderung pasif	Mulai reflektif dan kritis

Source: Primary Data, 2026.

Pada kegiatan diskusi moderasi beragama, perubahan yang paling terlihat terjadi pada pola pemahaman peserta terhadap keberagaman sosial dan keagamaan. Sebelum program dilaksanakan, sebagian peserta masih memahami toleransi secara pasif, yaitu sebatas tidak mengganggu kelompok lain. Namun, selama proses diskusi berlangsung, peserta mulai memahami bahwa toleransi tidak cukup dimaknai sebagai sikap diam terhadap perbedaan, tetapi juga memerlukan komunikasi, penghormatan, dan kerja sama sosial di tengah keberagaman.

Diskusi moderasi beragama juga memperlihatkan bahwa sebagian stereotip sosial yang berkembang di masyarakat sebenarnya muncul karena minimnya ruang interaksi terbuka antarkelompok. Ketika peserta diberikan kesempatan untuk berdialog dan mendiskusikan pengalaman sosial mereka, terjadi perubahan cara pandang yang lebih inklusif. Beberapa peserta mulai menyadari bahwa perbedaan

pandangan keagamaan bukan ancaman terhadap kehidupan sosial, melainkan realitas masyarakat yang harus dikelola secara dewasa dan demokratis.

Sementara itu, pelatihan literasi digital menjadi salah satu kegiatan yang paling mendapat perhatian masyarakat, terutama kelompok pemuda. Tingginya intensitas penggunaan media sosial membuat peserta merasa materi yang diberikan sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya diberikan pemahaman teoritis mengenai hoaks dan etika digital, tetapi juga diajak menganalisis contoh informasi provokatif yang sering beredar di media sosial.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mulai memahami pentingnya verifikasi informasi sebelum membagikannya di ruang digital. Bahkan, beberapa peserta mengaku mulai mengurangi kebiasaan menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya setelah memahami dampak sosial dari hoaks dan ujaran kebencian. Temuan ini memperlihatkan bahwa penguatan literasi digital memiliki kontribusi langsung terhadap pembentukan sikap kewarganegaraan yang lebih kritis dan bertanggung jawab.

Table 4. Respons Peserta terhadap Implementasi Program

Kegiatan Program	Respons Dominan Peserta
Penyuluhan kewarganegaraan	Peserta lebih memahami kaitan demokrasi dan kehidupan sosial
Diskusi moderasi beragama	Sikap terhadap perbedaan menjadi lebih terbuka
Pelatihan literasi digital	Peserta mulai kritis terhadap informasi media sosial
Simulasi partisipasi sosial	Peserta lebih aktif dalam musyawarah dan diskusi

Source: Primary Data, 2026.

Dalam implementasi simulasi partisipasi sosial, masyarakat dilibatkan dalam praktik musyawarah dan penyelesaian masalah sosial secara kolektif. Kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki potensi partisipatif yang cukup baik ketika diberikan ruang komunikasi yang setara. Simulasi musyawarah membantu peserta memahami pentingnya proses pengambilan keputusan bersama dalam kehidupan masyarakat demokratis. Beberapa peserta yang sebelumnya pasif mulai terlibat aktif dalam menyampaikan solusi dan argumentasi terhadap persoalan yang dibahas.

Selain faktor metode, keberhasilan implementasi program juga dipengaruhi oleh keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam setiap kegiatan. Kehadiran mereka meningkatkan legitimasi sosial program sehingga masyarakat lebih terbuka dan percaya terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Tokoh masyarakat tidak hanya berperan sebagai pendukung program, tetapi juga menjadi mediator sosial yang membantu menciptakan suasana dialog yang kondusif selama kegiatan berlangsung.

Meskipun demikian, implementasi program juga menghadapi beberapa kendala. Perbedaan tingkat pendidikan peserta menyebabkan kemampuan memahami materi tidak merata. Sebagian peserta membutuhkan pendampingan lebih intensif, terutama pada materi literasi digital. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan menyebabkan proses internalisasi nilai belum sepenuhnya optimal.

Dalam beberapa kegiatan, masih ditemukan peserta yang cenderung pasif dan belum terbiasa menyampaikan pendapat secara terbuka.

Namun secara keseluruhan, implementasi program menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis masyarakat lebih efektif dalam membangun keterlibatan sosial dibandingkan pendekatan formalistik dan satu arah. Program tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong perubahan pola komunikasi dan partisipasi sosial masyarakat. Dengan demikian, implementasi program ini memperlihatkan bahwa penguatan literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama memerlukan ruang belajar sosial yang dialogis, kontekstual, dan berbasis pengalaman masyarakat sehari-hari.

Efektivitas Program dalam Penguatan Literasi Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program edukasi PKn berbasis masyarakat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan pemahaman, sikap, dan partisipasi sosial masyarakat Kampung Sukosari. Efektivitas program tidak hanya terlihat pada aspek kognitif berupa meningkatnya pemahaman peserta terhadap konsep kewarganegaraan dan moderasi beragama, tetapi juga tampak pada perubahan pola komunikasi sosial, keterlibatan masyarakat dalam ruang publik komunitas, dan meningkatnya kesadaran kritis peserta terhadap informasi digital.

Berdasarkan hasil *post-test*, terjadi peningkatan pemahaman peserta pada hampir seluruh indikator yang diukur. Sebelum program dilaksanakan, sebagian besar peserta masih memahami kewarganegaraan dalam aspek formal dan administratif. Namun setelah mengikuti program, peserta mulai mampu menghubungkan konsep hak dan kewajiban warga negara dengan praktik sosial seperti partisipasi masyarakat, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang kontekstual lebih efektif dalam membantu masyarakat memahami nilai kewarganegaraan dibandingkan pendekatan teoritis yang bersifat satu arah.

Table 5. Hasil Pre-test dan Post-test Peserta

Indikator	Pre-test	Post-test
Pemahaman hak dan kewajiban warga negara	56%	84%
Pemahaman demokrasi dan partisipasi sosial	52%	85%
Pemahaman moderasi beragama	61%	87%
Kemampuan memilah informasi digital	48%	81%
Kesadaran pentingnya musyawarah sosial	58%	86%

Source: Primary Data, 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan terbesar terjadi pada aspek literasi digital dan partisipasi sosial masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kebutuhan besar terhadap kemampuan menghadapi arus informasi digital yang semakin kompleks. Sebelum program berlangsung, sebagian besar peserta cenderung menerima informasi secara pasif tanpa proses verifikasi. Setelah pelatihan dilakukan, peserta mulai memahami

pentingnya memeriksa sumber informasi dan mempertimbangkan dampak sosial dari informasi yang mereka sebarkan.

Perubahan pada aspek literasi digital menjadi penting karena ruang digital saat ini merupakan bagian dari praktik kewarganegaraan kontemporer. Warga negara tidak hanya berinteraksi di ruang sosial fisik, tetapi juga di ruang publik digital yang sangat memengaruhi pembentukan opini dan sikap sosial masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kritis terhadap informasi menjadi bagian penting dalam penguatan literasi kewarganegaraan modern (Castells, 2015). Dalam konteks ini, efektivitas program tidak hanya terlihat pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga pada terbentuknya kesadaran sosial yang lebih reflektif dalam menyikapi informasi publik.

Selain peningkatan aspek kognitif, efektivitas program juga terlihat dari perubahan perilaku sosial masyarakat. Berdasarkan hasil observasi selama program berlangsung, masyarakat mulai menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam kegiatan sosial kampung. Forum musyawarah yang sebelumnya didominasi oleh tokoh tertentu mulai melibatkan lebih banyak warga, termasuk kelompok pemuda. Beberapa peserta yang sebelumnya cenderung pasif mulai berani menyampaikan pendapat dan terlibat dalam diskusi sosial masyarakat.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam program berhasil menciptakan ruang sosial yang lebih inklusif. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, keterlibatan masyarakat dalam ruang publik merupakan indikator penting berkembangnya budaya demokratis. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam kehidupan masyarakat (Banks, 2017). Oleh karena itu, meningkatnya partisipasi warga dalam forum sosial menunjukkan bahwa program tidak hanya menghasilkan transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan praktik sosial masyarakat.

Table 6. Perubahan Sosial Masyarakat Setelah Program

Aspek Sosial	Sebelum Program	Setelah Program
Keterlibatan warga dalam musyawarah	Rendah	Lebih aktif dan terbuka
Partisipasi pemuda	Pasif	Mulai terlibat dalam kegiatan sosial
Respons terhadap perbedaan	Normatif	Lebih inklusif dan dialogis
Penggunaan media sosial	Tidak kritis	Mulai selektif terhadap informasi
Pola komunikasi sosial	Hierarkis	Lebih partisipatif

Source: Primary Data, 2026.

Pada aspek moderasi beragama, efektivitas program terlihat dari perubahan pola pandang peserta terhadap keberagaman sosial dan keagamaan. Setelah mengikuti diskusi moderasi beragama, peserta mulai memahami bahwa toleransi tidak cukup dimaknai sebagai sikap pasif “tidak mengganggu” kelompok lain, tetapi juga memerlukan keterbukaan komunikasi dan penghormatan terhadap hak sosial kelompok yang berbeda. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan dialogis lebih efektif dibandingkan pendekatan ceramah normatif dalam membangun kesadaran moderasi beragama.

Hasil refleksi bersama peserta juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih mudah memahami nilai moderasi beragama ketika materi dikaitkan dengan pengalaman sosial mereka sehari-hari. Beberapa peserta mengaku mulai mengurangi prasangka terhadap kelompok yang berbeda pandangan sosial maupun keagamaan setelah mengikuti kegiatan diskusi dan simulasi sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengalaman dialog langsung memiliki pengaruh besar dalam membangun sikap inklusif masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan sosial masyarakat tidak terjadi secara instan dan merata. Masih terdapat sebagian kecil peserta yang menunjukkan resistensi terhadap pola diskusi terbuka, terutama peserta yang terbiasa dengan pola komunikasi sosial yang hierarkis. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan program menyebabkan proses internalisasi nilai belum sepenuhnya optimal. Dalam beberapa kasus, peserta masih membutuhkan pendampingan lanjutan agar perubahan perilaku sosial dapat berlangsung secara lebih stabil dan berkelanjutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama tidak dapat dipahami sebagai program jangka pendek yang selesai melalui satu kali kegiatan edukasi. Perubahan kesadaran sosial memerlukan proses yang berkelanjutan karena berkaitan dengan perubahan pola pikir, budaya komunikasi, dan praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan program dan dukungan sosial masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas hasil yang telah dicapai.

Selain itu, efektivitas program juga dipengaruhi oleh keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam proses edukasi. Kehadiran mereka memberikan legitimasi sosial terhadap program sehingga masyarakat lebih terbuka dan partisipatif dalam mengikuti kegiatan. Dukungan struktur sosial lokal terbukti menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses perubahan sosial yang dilakukan melalui program edukasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program edukasi PKn berbasis masyarakat efektif dalam memperkuat literasi kewarganegaraan dan moderasi beragama masyarakat Kampung Sukosari. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta, berkembangnya sikap sosial yang lebih inklusif, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ruang publik komunitas, serta tumbuhnya kesadaran kritis terhadap penggunaan media sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kewarganegaraan demokratis di masyarakat multikultural memerlukan pendekatan edukasi yang dialogis, kontekstual, dan berbasis pengalaman sosial masyarakat sehari-hari.

CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Sukosari masih menghadapi rendahnya literasi kewarganegaraan, lemahnya partisipasi sosial, pemahaman moderasi beragama yang masih normatif, serta rendahnya literasi digital dalam menyikapi informasi di media sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan program edukasi PKn berbasis masyarakat yang mengintegrasikan literasi kewarganegaraan, moderasi beragama, dan literasi digital melalui pendekatan partisipatif dan dialogis. Implementasi program menunjukkan adanya

peningkatan keterlibatan masyarakat dalam diskusi sosial, musyawarah, dan aktivitas komunitas, serta berkembangnya sikap yang lebih inklusif dan kritis terhadap perbedaan sosial maupun informasi digital. Secara keseluruhan, program edukasi PKn berbasis masyarakat terbukti efektif dalam memperkuat kesadaran kewarganegaraan dan moderasi beragama masyarakat melalui pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman sosial masyarakat.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kampung Sukosari Kecamatan Baradatu yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kampung, serta seluruh peserta kegiatan yang telah mendukung proses penelitian dan pelaksanaan edukasi PKn berbasis masyarakat. Selain itu, penulis mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun akademik sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

REFERENCES

Abdullah, M. A. (2018). *Islam dan moderasi beragama di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Azra, A. (2020). *Moderasi Islam di Indonesia: Dari ajaran, ibadah, hingga perilaku*. Jakarta: Kencana.

Banks, J. A. (2017). *Citizenship education and global migration: Implications for theory, research, and teaching*. Washington DC: American Educational Research Association.

Castells, M. (2015). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age* (2nd ed.). Cambridge: Polity Press.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.

Hosen, N. (2019). *Islam and the struggle for constitutionalism in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.

Hoskins, B., Villalba, E., Van Nijlen, D., & Barber, C. (2012). Measuring civic competence in Europe: A composite indicator based on IEA civic education study 1999 for 14 years old in school. *European Journal of Education*, 47(3), 508–530.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 559–603). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Kymlicka, W. (2012). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford: Oxford University Press.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Milner, H. (2002). *Civic literacy: How informed citizens make democracy work*. Hanover: Tufts University Press.

Mouffe, C. (2005). *On the political*. London: Routledge.

Suryadi, K. (2018). Pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal dalam penguatan karakter bangsa. *Jurnal Civics*, 15(2), 112–124.

Wahid Foundation. (2021). *Laporan tahunan tren intoleransi dan radikalisme di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.

Winataputra, U. S. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan: Refleksi historis-epistemologis dan rekonstruksi untuk masa depan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.